

BAB IV

KESIMPULAN

Perbatasan Amerika Serikat – Meksiko merupakan wilayah perbatasan yang terbentuk dari perang dan konflik antar wilayah selama abad ke-19. Pembentukan perbatasan ini menjadi awal pertanda mengenai hubungan interaksi antar kedua negara, baik dalam menumbuhkan peluang kerjasama hingga pada kemunculan masalah imigrasi. Upaya untuk menciptakan reformasi imigrasi di perbatasannya telah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat semenjak tahun 1980-an. Pasca serangan teroris pada 9 September 2001, baik pada pemerintahan Presiden Bush maupun Obama sama-sama menunjukkan adanya peningkatan terhadap pengamanan di perbatasan, terutama melalui pembangunan tembok fisik dan penggunaan kekuatan militer. Sebelumnya, pasukan militer hanya bertugas untuk mencegah penyelundupan narkoba, meskipun dalam praktiknya juga membantu penegakan imigrasi di sepanjang perbatasan. Setelah memenangkan kursi kepresidenan, Presiden Trump semakin meningkatkan keamanan imigrasi di perbatasan Amerika Serikat – Meksiko dengan mengeluarkan *Executive Order* 13767. Perintah ini merupakan dasar sekuritisasi perbatasan Selatan karena dianggap sebagai tempat masuknya imigran ilegal, tumbuhnya aktivitas organisasi kriminal transnasional, serta masuknya obat-obatan terlarang yang akan berdampak buruk pada keamanan negaranya. Melalui perintahnya tersebut, Trump menyerukan adanya pembangunan tembok fisik, pengerahan ribuan personel militer, serta pemberdayaan lembaga hukum lokal seperti polisi negara bagian yang berperan sebagai lapis kedua BP untuk menangkap dan menahan imigran di bawah ketentuan hukum.

Konsep kekerasan melalui segitiga kekerasan yang digunakan penulis kemudian menjelaskan bagaimana ternyata *Executive Order* 13767 tidak hanya memberikan efek terhadap praktik kekerasan yang dialami oleh imigran, namun juga kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang perbatasan Amerika Serikat – Meksiko. Mengenai kekerasan langsung, dapat diidentifikasi dari adanya pengusiran, pembuangan, penembakan, dan penyiksaan terhadap imigran yang dilakukan oleh CBP maupun ICE. Lalu, mengenai kekerasan kultural dapat diidentifikasi ketika petugas CBP menangkap dan memeriksa orang Latin bahkan ketika mereka tidak melakukan kejahatan apapun. Kemudian, mengenai kejahatan struktural dapat diidentifikasi melalui adanya praktik pengambilan tanah milik penduduk perbatasan oleh pemerintah Amerika Serikat secara paksa. Mengenai angka kekerasan, dapat diidentifikasi melalui kebijakan pembangunan tembok Trump yang berkontribusi terhadap naiknya angka kematian yaitu dari 2 kasus menjadi 5 kasus di tahun 2017 – 2020. Angka cedera serius seperti

patah tulang kaki, cedera leher, dan cedera tulang belakang kepala juga meningkat drastis dari 188 kasus menjadi 406 kasus di tahun 2017 – 2020. Selain itu, peningkatan kekuatan militersiasi melalui CBP dan ICE turut menaikkan angka kekerasan dan kematian terhadap imigran baik yang mencoba untuk menyeberang melalui perbatasan, ataupun yang ditangkap pada wilayah negara Amerika Serikat. Di perbatasan, angka kematian imigran meningkat dari 35 kasus menjadi 81 kasus di tahun 2017 – 2020 yang mana banyak dari imigran tersebut meninggal karena ditembak dan mengalami kecelakaan setelah terlibat dalam kejar-kejaran mobil dengan CBP. Sedangkan di dalam wilayah Amerika Serikat, angka imigran yang meninggal selama ditahan oleh ICE juga meningkat dari 32 kasus menjadi 50 kasus di tahun 2017 – 2020 yang banyak disebabkan oleh kondisi sel tahanan yang buruk, kesulitan mengakses perawatan medis, serta kegagalan ICE dalam menangani penyebaran Covid-19.

Baik CBP maupun ICE sebenarnya sama-sama melakukan kekerasan kepada imigran, namun tindak kekerasan yang dilakukan CBP lebih banyak menggunakan kekuatan fisik, seperti penembakan, penyiksaan, dan pengusiran imigran. Sedangkan pada kekerasan yang dilakukan oleh ICE terhadap imigran banyak terjadi karena masalah medis, seperti adanya kondisi sel yang buruk, tidak adanya akses medis bagi imigran yang sakit, serta kelalaian pada penanganan penyebaran Covid-19 di tahanan. Namun, penggunaan kekuatan fisik oleh ICE juga dapat diidentifikasi melalui kekerasan yang dilakukan selama penangkapan imigran di ruang sensitif, seperti membanting imigran ke tembok, menyeret imigran dari mobil, menodongkan senjata ke para imigran, dan penculikan terhadap imigran. Meskipun kebijakan Trump menyebabkan kenaikan angka kekerasan dan kematian di antara para imigran, namun tuntutan yang diarahkan kepada petugas CBP dan ICE pada akhirnya sebagian besar ditolak. Hal ini mengungkapkan fakta bahwa para imigran umumnya tidak memiliki banyak hak yang dapat ditegakkan dalam undang-undang Amerika Serikat. Berdasarkan hal tersebut, petugas perbatasan dapat seenaknya menyalahgunakan kekuatan dalam memperlakukan imigran melalui hukum imigrasi yang identik dengan penggunaan kekerasan langsung. Namun, aksi kekerasan terhadap imigran tetap tidak dibenarkan berdasarkan kerangka hak asasi manusia internasional yang memandang semua individu memiliki hak dasar yang sama. Sudah seharusnya pemerintah Amerika Serikat menghentikan praktik kekerasan terhadap imigran dan mengedepankan strategi penegakkan imigrasi berdasarkan kerangka hak asasi manusia, apalagi kebijakan keras Presiden Trump untuk mereformasi hukum imigrasinya selama tahun 2017 – 2020 juga tidak terbukti efektif dalam memerangi jumlah imigran yang masuk di perbatasan Amerika Serikat – Meksiko, hal ini malah justru meningkatkan angka cedera dan kematian yang dialami oleh para imigran.